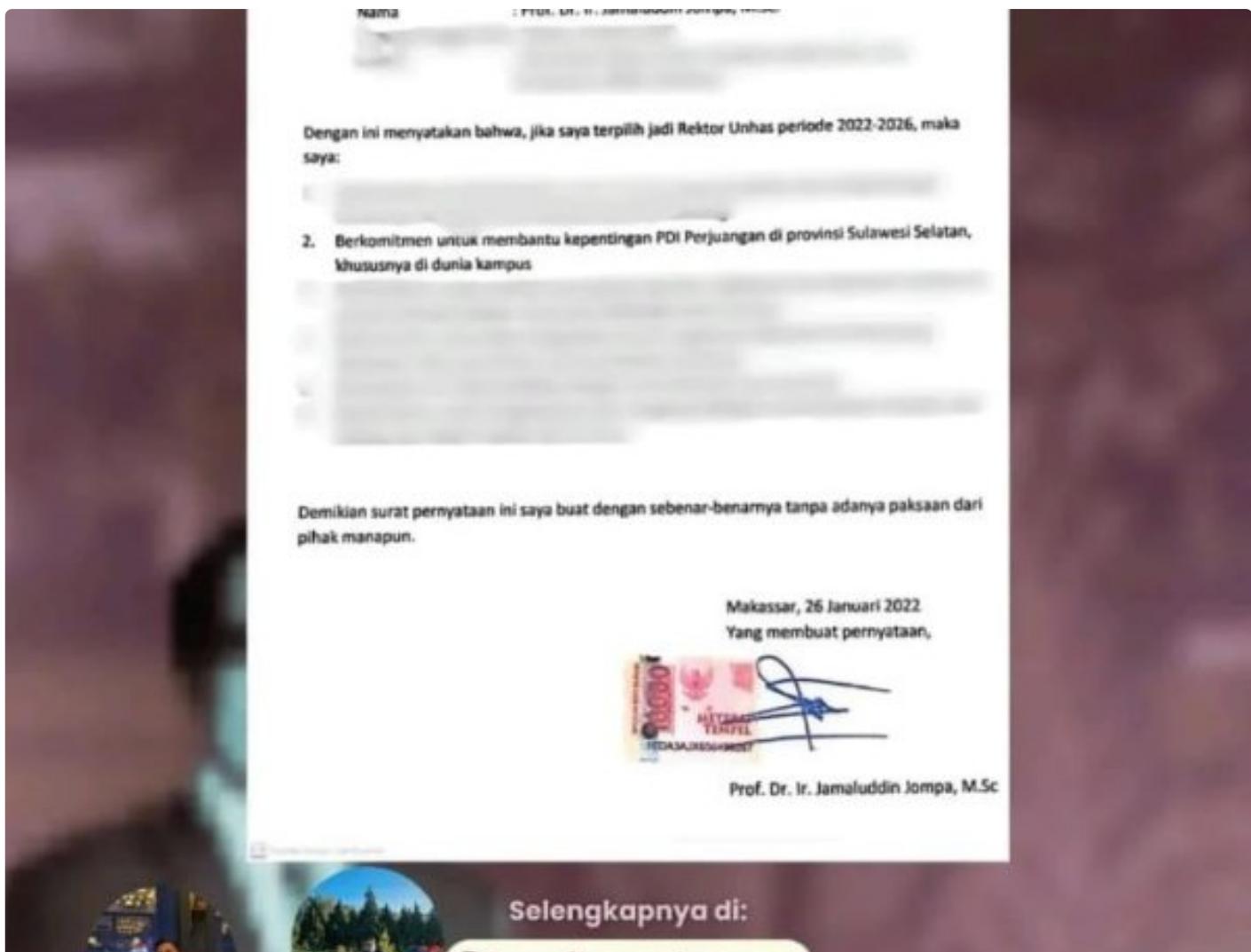


WARTAWAN

ADAKSI Soroti Dokumen Komitmen Prof Jamaluddin Jompa, Kaitkan dengan Isu UKT di PTNBH

SM Network - SULSEL.WARTAWAN.ORG

Dec 25, 2025 - 10:32



Cuplikan layar unggahan ADAKSI di Instagram

JAKARTA — Aliansi Dosen Akademik dan Kovokasian Seluruh Indonesia (ADAKSI) menyoroti dugaan problem tata kelola di perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) melalui unggahan di akun Instagram resmi mereka, @aliansi_dosen_asn_kemdiktisaintek yang memposting ulang tangkapan layar

unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (BEM FKM Unhas).

Unggahan tersebut menampilkan foto sebuah dokumen Surat Pernyataan dan Komitmen yang ditandatangani oleh Prof. Jamaluddin Jompa, bertanggal 26 Januari 2022. Dalam tangkapan layar yang beredar, terlihat satu poin pernyataan yang diperjelas, sementara lima poin lainnya dikaburkan.

Poin yang disorot oleh BEM FKM Unhas dalam unggahan tersebut adalah komitmen Prof. Jamaluddin Jompa untuk membantu kepentingan partai politik tertentu di Sulawesi Selatan, khususnya di lingkungan kampus. Poin inilah yang kemudian menjadi perhatian utama ADAKSI dan dijadikan dasar kritik terhadap praktik penyelenggaraan PTNBH.

Dalam keterangan unggahannya, ADAKSI mengajak publik kembali berpikir mengenai esensi PTNBH. Mereka menilai otonomi luas yang diberikan negara kepada PTNBH seharusnya dimanfaatkan untuk memajukan pendidikan tinggi, bukan justru membuka ruang bagi konflik kepentingan politik praktis di lingkungan akademik.



aliansomensnasnkemdiktisai
ntek

Mengikuti

⋮

14 Desember



bemfkmunhas

⋮

🎵 Efek Rumah Kaca • Mosi Tidak Percaya



BEM FKM UNHAS
PERIODE 2025-2026

SURAT PERNYATAAN DAN KOMITMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.

Dengan ini menyatakan bahwa, jika saya terpilih jadi Rektor Unhas periode 2022-2026, maka saya:

2. Berkomitmen untuk membantu kepentingan PDI Perjuangan di provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di dunia kampus

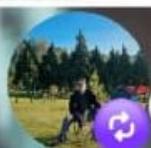
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Makassar, 26 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc



Selengkapnya di:

bemfkmunhas.org



#ReaktualisasiKesadaranKolektif



[bemfkmunhas](#)

[BEM FKM UNHAS](#)

[bemfkm_unhas](#)

[bemfkmunhas.org](#)

1.044

52

64

638



Disukai oleh [firdaus.kasim_](#) dan lainnya

aliansomensnasnkemdiktisaintek Postingan adek-adek
@bemfkmunhas ini mengajak kita kembali berpikir
tentang esensi PTNBH. Keleluasaan yang diberikan

ADAKSI kemudian mengaitkan temuan dokumen tersebut dengan persoalan tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibebankan kepada mahasiswa. Menurut mereka, mahalnya UKT yang dibayarkan mahasiswa tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan dosen maupun kualitas layanan pendidikan yang diterima mahasiswa.

“UKT mahal yang selama ini dibayarkan mahasiswa kepada PTNBH ternyata tidak sampai pada kesejahteraan dosen maupun peningkatan layanan kepada mahasiswa,” tulis ADAKSI dalam unggahan tersebut.

Melalui pernyataan itu, ADAKSI mendorong masyarakat untuk bersikap lebih kritis dan mempertanyakan transparansi pengelolaan dana pendidikan di PTNBH, termasuk aliran dana UKT yang dipungut dari mahasiswa setiap semester.

ADAKSI juga menyerukan agar sistem PTNBH dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah pusat dan lembaga berwenang. Sejumlah pihak disebut dalam unggahan tersebut untuk melakukan penelusuran dan evaluasi, di antaranya Presiden Republik Indonesia, kementerian terkait, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan dan tanggapan resmi. (*)